Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume 5, Nomor 4, Oktober 2026
E-ISSN : 2962-0813; P-ISSN : 2964-5328, Hal. 225-236
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i4.7715
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

(Opini Audit BPK sebagai Moderasi)

Anita Wulandari[1*], Avininda Dewi Nindiasari[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia
**Penulis Korespondensi: nitaxwae13@gmail.com*

Abstract. *Fiscal capacity among local governments in Indonesia still varies a great deal, and it is not always clear whether a larger own-source revenue base actually translates into better financial management. This study examines whether Local Own-Source Revenue (PAD) influences the financial performance of regency and city governments in Central Java Province during the 2020–2024 period, and whether the audit opinions issued by the Supreme Audit Agency (BPK) act as a moderator in that relationship. An associative quantitative design was applied to a balanced panel consisting of 35 regencies and cities observed over five years (175 observations), drawn from Local Government Financial Reports, BPK audit reports, and DJPK publications through purposive sampling. Financial performance was proxied by an efficiency ratio, while government size (log of total assets) served as a control variable, and the data were analyzed in EViews 13 using panel-based moderated regression. Model selection tests (Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier) confirmed the Co-Effect Model. The estimation results indicate that PAD has no significant effect on financial performance, and the interaction between PAD and BPK audit opinion likewise fails to produce a significant moderating effect, mainly because almost every sampled government received an unqualified (WTP) opinion, leaving too little variation for a moderation effect to surface. These findings imply that budgetary efficiency is more plausibly shaped by factors outside PAD and audit-opinion quality alone.*

Keywords: *BPK Audit Opinion; Central Java; Financial Performance; Local Government; Locally-Generated Revenue.*

Abstrak. Kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia masih memperlihatkan kesenjangan yang cukup lebar, dan besarnya penerimaan asli daerah tidak selalu berbanding lurus dengan mutu pengelolaan keuangannya. Penelitian ini mengkaji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020 hingga 2024, serta apakah opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan sebagai variabel moderator dalam hubungan tersebut. Desain kuantitatif asosiatif diterapkan pada panel seimbang yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota yang diamati selama lima tahun (175 pengamatan), yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan audit BPK, dan publikasi DJPK melalui pengambilan sampel purposif. Kinerja keuangan diproksikan oleh rasio efisiensi, sedangkan ukuran pemerintah (logaritma aset total) berfungsi sebagai variabel kontrol, dan data dianalisis dalam EViews 13 menggunakan regresi termoderasi berbasis panel. Uji pemilihan model (Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier) mengonfirmasi *Common Effect Model (CEM)*. Hasil estimasi menunjukan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, dan interaksai antara PAD dan opini audit BPK juga tidak menghasilkan efek moderasi yang signifikan, terutama karena hamper setiap pemerintah daerah dalam sampel menerima wajar tanpa pengecualian (WTP), sehingga variasi yang ada terlalu kecil untuk memungkinka munculnya efek moderasi.

Kata Kunci: Jawa Tengah; Kinerja Keuangan; Opini Audit BPK; Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Kemampuan pemerintah daerah mengelola anggaran yang dimilikinya menjadi tolok ukur utama untuk utuk menilai kinerja keuangan daerah tersebut (Mahmudi, 2019). Salah satu ukuran yang sering dipakai untuk mengevaluasi seberapa mandiri sebuah daerah dalam aspek fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena jumlah PAD menggambarkan seberapa efektif pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan potensi ekonominya. Berdasarkan

Naskah Masuk: 01 Juli 2026; Revisi: 20 Agustus 2026; Diterima: 01 September 2026; Terbit: 01 Oktober 2026

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan aantara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang berasal dari pajak, retribusi, pendapatan pengelolaan asset daerah, serta sumber pendapatan sah lainnya. Semakin tinggi proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, semakin besar otonomi keuangan tersebut (Fariyanda dan Umyana, 2025). Sebaliknnya, pendapatan daerah yang rendah menunjukan ketergantungan daerah tersebut pada transfer dana dari pemerintah pusat (Maggara dkk., 2024).

Persoalannya, kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah di Jawa Tengah masih cukup mencolok. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024) memperlihatkan bahwa PAD Kota Semarang telah menembus angka Rp2 triliun, sementara Kabupaten Rembang, Blora, dan Wonosobo masih berada di bawah Rp500 miliar. Perbedaan-perbedaan ini pada dasarnya mencerminkan kapasitas yang bervariasi di antara berbagai pemerintah kota dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal mereka secara optimal, dan karenanya dapat menyebabkan ketimpangan ragional dalam kondisi keuangan mereka (Lathifa, 2019). Meski otonomi daerah telah memberi keleluasaan yang luas dalam pengelolaan anggaran, dari data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah tetap mengandalkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil sebagai tumpuan pendapatan utamanya, sebuah kondisi yang mengindikasikan bahwa optimalisasi PAD di lapangan belum sepenuhnya tercapai.

Kajian-kajian sebelumnya belum sepenuhnya sepakat mengenai hubungan PAD dengan kinerja keuangan daerah. Zahrah dan Zaen (2024), Suandani (2021), Pratama dan Maslichah (2022), serta Ardelia dkk. (2022) melaporkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah, sementara Mardiani (2018) dan Kusumasari (2017), justru tidak menemukan pengaruh yang berarti. Perbedaan hasil ini membuka ruang untuk menelaah lebih jauh peran variabel lain yang mungkin turut menentukan kekuatan hubungan tersebut, salah satunya kualitas tata kelola keuangan yang tecermin dari opini audit BPK. Dalam kerangka teori keagenan, opini audit berfungsi sebagai mekanisme pemantauan yang mengurangi asimetri iinformasi antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daeraj sebagai agen (Jensen & Meckling, 1976), sehingga secara konseptual opini audit yang baik semestinya memperkuat manfaat PAD bagi perbaikan kinerja keuangan (Mahmudi, 2019).

Kombinasi PAD sebagai variabel bebas, opini audit BPK sebagai pemoderasi, dan ukuran pemerintah daerah sebagai variabel kontrol masih jarang dikaji secara bersamaan, terlebih pada lingkup kabupaten/kota di Jawa Tengah. Provinsi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena mencakup 35 pemerintah daerah (29 kabupaten dan 6 kota) dengan variasi kapasitas fiskal yang

cukup lebar, sekaligus karena seluruh daerah tersebut rutin diaudit oleh BPK sehingga tersedia data opini audit yang lengkap. Rentang waktu 2020–2024 dipilih karena mencakup masa awal pandemi COVID-19 yang menekan penerimaan daerah sekaligus fase pemulihan ekonomi sesudahnya, sehingga rentang waktu ini relevan untuk menangkap dinamika hubungan antara PAD, opini audit, dan kinerja keuangan daerah dalam kondisi yang tidak sepenuhnya normal. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengkaji dampak PAD terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota di Jawa Tengah serta mengevaluasi apakah opini audit berperan sebagai variabel moderasi dalam konteks ini, temuan ini berharap dapat memperkata literayir mengenai akuntansi sektor publik dan memberikan wawasan praktis bagi pemerintah daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan menggambarkan antara masyarakat *(principal)* dan pemerintah (agen) (Jensen & Meckling, 1976). Di sector publik, masyarakat berperan sebagai *prinsipal* yang mempercayakan pengelolaan dana publik kepada pemerintah daerah selaku agen. Karena agen umumnya memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan *prinsipal*, muncul potensi asimetri informasi yang membuat masyarakat sulit menilai secara langsung apakah pengelolaan keuangan daerah sudah efektif dan efisien. Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan menjadi salah satu mekanisme untuk meredam asimetri tersebut, karena opini audit yang dihasilkan mencerminkan penilaian independen atas kewajaran dan kepatuhan pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri. Hal ini mencakup pajak daerah, retribusi, pendapatan dari pengelolaan aset daerah, serta pendapatan sah lainnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Menurut Halim (2018), pendapatan asli daerah mencerminkan total pendapatan yang dihasilkan dari potensi ekonomi yang melekat pada suatu daerah dan digunakan untuk membiayai tata kelola serta pembangunan daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah, semakin besar otonomi fiskal daerah tersebu, PAD sering dijadikan indikator utama untuk menilai kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mahmudi (2019) mengatakan bahwa ada banyak indikator yang digunakan untuk menggukur kinerja keuangan pemerintah daerah, termasuk indikator otonomi, efektivitas, pertumbuhan, aktivitas, dan efisiensi. Rasio efisiensi, yang merupakan perbandingan antara

pengeluaran aktual pemerintah daerah dan pendapatan aktual, secara langsung menunjukkan seberapa hemat pemerintah daerah membelanjakan setiap rupiah yang mereka terima. Jika rasio ini lebih rendah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah lebih efisien sebaliknya, jika rasionya lebih tinggi, pengelolaan tersebut lebih tidak efisien.

Tabel 1. Kriteria Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Rasio Efisiensi	Kriteria
< 60%	Sangat Efisien
60% – 80%	Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
> 100%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2019)

Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan

Opini audit adalah pernyataan profesional dari seorang auditor mengenai apakah laporan keuangan layak disajikan berdasarkan temua audit (Mulyadi, 2017). Menurut Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004, Badan PEmeriksa Keuangan (BPK) dapat mengeluarkan empat jenis opini: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), yang dalam penelitian ini diberi skor ordinal berturut-turut 4, 3, 2, dan 1 mengikuti adaptasi dari Siregar dan Setyaningrum (2015). Semakin tinggi skor opini audit, semakin baik kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Sejumlah penelitian empiris telah menunjukan adanya dampak positif PAD terhadap kinerja keuangan Pemda. Ini termasuk penelitian Zahra dan Zean (2024), Suandani (2021) tentang kabupaten dan kota di Provinsi Bali, Pratama dan Maslichah (2022), Ardelia dkk. (2022) di Kedudukan Pekalongan, dan Putri (2025) tentang pemerintahan daerah di Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa daerah yang lebih tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membiyai kebutuhan operasional dan lebih mandiri dari dana pemerintah pusat (Mahmudi, 2019), sehingga secara teoritis pengelolaan keuangannya cenderung lebih efisien. Berdasarkan pembahasan ini, hipotesis pertama penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain pengaruh langsung PAD, sejumlah studi turut mengaitkan opini audit BPK dengan kinerja keuangan daerah. Zahrah dan Zaen (2024), Suandani (2021), Dewata dkk. (2017),

Susanti dan Amir (2016), serta Putri (2025) menemukan bahwa opini audit turut memengaruhi kinerja keuangan pemda, sejalan dengan logika teori keagenan bahwa opini audit yang baik menandakan sistem pengendalian internal dan kepatuhan yang lebih memadai, sehingga memungkinkan pemanfaatan PAD berjalan lebih optimal (Ditasari & Sudrajat, 2020). Dengan kata lain, opini audit diperkirakan dapat memperkuat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga hipotesis kedua penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H2: Opini Audit BPK memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Secara ringkas, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan PAD sebagai variabel bebas yang dianggap memengaruhi kinerja keuangan pemda (variabel kontrol), dengan opini audit BPK berperan sebagai variabel moderator yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Sementara itu, ukuran pemerintah daerah diatur sebagai variabel kontrol agar perbedaan karakteristik di antara daerah tidak mengganggu hasil estimasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendatakan kuantitatif asosiatif untuk mengkaji dampak pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 hingga 2024. Opini audit BPK digunakan sebagai variabel moderator dan ukuran pemerintah daerah digunakan sebagai variabel kontrol. Data sekunder diperoleh dari publikasi Direktorat Janderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Laporan Hasil Audit (LHP) BPK, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Data ini dikompilasi menjadi dataset panel gabungan yang mencakup dimensi *cross-sectional* (35 kabupaten/kota) dan urutan waktu (2020–2024).

Populasi penelitiaan mencangkup seluruh 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah (29 kabupaten dan 6 kota). Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria berikut: pemerintah daerah di Jawa Tengah, , menerbitkan LKPD secara lengkap sepanjang 2020–2024, memiliki data PAD, total aset, dan opini audit BPK yang lengkap, serta memiliki data realisasi pendapatan dan belanja untuk menghitung rasio efisiensi. Seluruh 35 kabupaten/kota memenuhi kriteria tersebut, sehingga jumlah observasi yang terbentuk adalah 35 daerah × 5 tahun = 175 unit observasi (panel seimbang).

PAD (variabel independent) diukur menggunakan logaritma natural realisasi PAD yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk setiap daerah. Kinerja keuangan (variabel dependen) diproksikan dengan rasio efisiensi, takni realisasi belanja daerah di bagi dengan realisasi pendapaan daerah di kali 100 persen. Opini audit BPK (variabel moderasi)

diukur dengan skala ordinal 1 sampai 4 mengikuti urutan TMP, TW, WDP, dan WTP. Ukuran pemerintah daerah (variabel konrol) diukur dari lgaritma natural dari total aset yang dilaporkan dalam neraca LKPD. Model regresi modrasi yang diestimasi dirumuskan sebagai berikut.

$$Yit = \alpha + \beta 1PADit + \beta 2OPINIit + \beta 3(PAD \times OPINI)it + \beta 4SIZEit + eit \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots..(i)$$

dengan Y adalah kinerja keuangan (rasio efisiensi), PAD adalah Pendapatan Asli Daerah, OPINI adalah opini audit BPK, (PAD×OPINI) adalah variabel interaksi yang merepresentasikan efek moderasi, SIZE adalah ukuran pemda, α konstanta, β1–β4 koefisien regresi, e adalah error term, i menunjukkan kabupaten/kota, dan t menunjukkan tahun pengamatan.

Dengan menggunakan EViews 13, data dievaluasi menggunakan regresi data panel yang menggunakan tiga model estimasi: Model Efek Gabungan (CEM), Model Efek Tetap (FEM), dan Model Efek Acak (REM). Uji Chow (CEM vs. FEM) uji Hausman (FEM vs. REM) uji Lagrange Multiplier (CE vs. REM) digunakan untuk memilih model yang paling sesuai dengan situasi tersebut. Sebelum melakukan analisis hasil regresi, model yang dipilih diuji dengan asumsi-asumsi klasik. Ini mencakup pengujian heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Jika koefisien korelasi antara variabel independen melebihi 0.90, itu menunjukkan multikolinearitas. Untuk menguji hipotesis, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Selain itu uji-t digunakan untuk menguji, efek persial dari masing-masing variabl independen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Studi ini melihat 175 pengamatan yang dilakukan oleh 35 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah selama periode lima tahun (2020-2024). Tabel 2 menampilkan ringkasan statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif.

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
PAD (miliar Rp)	175	219,54	2.885,77	473,64	367,71
Rasio Efisiensi (%)	175	84,3756	110,3145	100,0624	4,0628
Total Aset (miliar Rp)	175	2.346,46	27.504,06	5.102,76	3.696,03
Ukuran Pemda (Ln Total Aset)	175	28,4839	30,9454	29,1336	0,4374

Sumber: Data sekunder diolah (2026)

Nilai PAD antardaerah berkisar dari Rp219,54 miliar hingga Rp2.885,77 miliar dengan rata-rata Rp473,64 miliar dan simpangan baku Rp367,71 miliar, sebuah rentang yang cukup

lebar dan menandakan bahwa kapasitas fiskal antarkabupaten/kota di Jawa Tengah belum merata. Rasio efisiensi kinerja keuangan justru menunjukkan pola sebaliknya, yaitu relatif seragam pada kisaran 84,38 persen hingga 110,31 persen dengan rata-rata 100,06 persen. Total aset daerah bervariasi dari Rp2.346,46 miliar sampai Rp27.504,06 miliar, sedangkan setelah ditransformasi ke bentuk logaritma (ukuran pemerintah daerah), sebarannya menjadi jauh lebih sempit, yakni 28,48 hingga 30,95.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Opini Audit BPK.

Opini Audit BPK	Jumlah Observasi	Persentase (%)
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	174	99,43
WDP (Wajar Dengan Pengecualian)	1	0,57
TW (Tidak Wajar)	0	0,00
TMP (Tidak Memberikan Pendapat)	0	0,00
Total	175	100,00

Sumber: Data sekunder diolah (2026)

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3, dari 175 observasi, sebanyak 174 observasi (99,43 persen) memperoleh opini WTP dan hanya 1 observasi (0,57 persen) yang memperoleh opini WDP, sementara tidak ada satu pun observasi dengan opini TW ataupun TMP. Dominasi opini WTP yang nyaris mutlak ini menjadi catatan penting yang perlu diingat ketika menafsirkan hasil pengujian variabel moderasi pada bagian berikutnya, karena variasi data pada variabel ini sangat terbatas.

Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Proses pengujian tiga tahap digunakan untuk memilih model estimasi. Menurut uji Chow, nilai chi-kuadrat *cross-section* sebesar 0,9071 dan statistik F *cross-section* sebesar 0,9654, keduanya jauh di atas 0,05 sehingga, Model Efek Bersama (*Common Effects Model*/CEM) lebih tepat daripada Model Efek Tetap (*Fixed Effects Model*). Nilai chi-kuadrat Hausman adalah 7,190897 dengan probabilitas 0,0661. meski angka ini masih di atas 0,05 (mengarah pada *Random Effect Model*), keluaran EViews turut mencatat bahwa estimasi varians efek acak *cross-section* bernilai nol, yang menandakan komponen acak antardaerah nyaris tidak ada. Hasil Uji Lagrange Multiplier memperkuat kesimpulan ini pada dimensi *cross-section*, statistik Breusch-Pagan sebesar 7,406988 dengan probabilitas 0,0065 sekilas mengindikasikan adanya komponen acak, namun karena varians efek acak *cross-section* pada Uji Hausman tercatat nol, indikasi tersebut tidak cukup kuat secara struktural. Dengan mempertimbangkan ketiga hasil pengujian secara keseluruhan, penelitian ini menetapkan *Common Effect Model* sebagai model estimasi akhir.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas.

	X (PAD)	Interaksi	Kontrol (SIZE)
X (PAD)	1,000000	0,664980	0,814249
Interaksi	0,664980	1,000000	0,533216
Kontrol (SIZE)	0,814249	0,533216	1,000000

Sumber: Output EViews 13, data diolah (2026)

Semua koefisien korelasi antara variabel independen berada di bawah ambang batas 0,90, dengan nilai tertinggi terletak antara PAD dan variabel kontrol sebesar 0,814249, sehingga model penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas yang serius. Pengujian heteroskedastisitas, yang dilakukan dengan melakukan regresi nilai absolut residu terhadap semua variabel independen, menghasilkan probabilitas 0,3063 untuk PAD, 0,2511 untuk variabel interaksi, dan 0,7138 untuk variabel kontrol semuanya di atas 0,05, untuk menunjukkan bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Hasil Estimasi Regresi dan Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Estimasi *Common Effect Model.*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	117,4229	21,23993	5,528400	0,0000
X (PAD)	-0,809952	1,434633	-0,564571	0,5731
Interaksi (PAD×OPINI)	-0,006807	0,154915	-0,043941	0,9650
Kontrol (SIZE)	0,173019	1,220663	0,141742	0,8875

Sumber: Output EViews 13, data diolah (2026)

Tabel 6. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi.

Uraian	Nilai
R-squared	0,005292
Adjusted R-squared	-0,012159
F-statistic	0,303262
Prob(F-statistic)	0,823009

Sumber: Output EViews 13, data diolah (2026)

Hasil uji-t menunjukan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan H1 ditolak tanda negatif koefisien bahkan bertentangan dengan hipotesis awal. Nilai p untuk PAD adalah 0,5731 (> 0,05). Selain itu, jenis interaksi antara PAD dan opini audit BPK tidak signifikan, dengan koefisien -0,006807 dan nilai p 0,9650. Akibatnya, H2 juga ditolak karena opini audit BPK tidak memoderasi pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemda. Selain itu, variabel kontrol, ukuran pemda, tidak memiliki dampak yang signifikan (probabilitas 0,8875). Uji F menghasilkan nilai 0,303262

dengan probabilitas 0,823009, yang menunjukan bahwa ketiga variabel independent ini secara kolektif tidak memengaruhi kinerja keuanga kabupaten dan kota. Nilai R-squared sebesar 0,005292 (Adjusted R-squared bahkan negatif, -0,012159) menegaskan bahwa model penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebagian sangat kecil dari variasi rasio efisiensi kinerja keuangan daerah.

Pembahasan

Temuan dalam penelitian ini bahwa pendapatan daerah tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah berbeda dengan sebagaian besar literatur yang menjadi dasar H1, seperti Zahrah dan Zaen (2024), Suandani (2021), Pratama dan Maslichah (2022), Ardelia dkk. (2022), dan Putri (2025), yang seluruhnya melaporkan hubungan positif. Perbedaan ini kemungkinan besar lebih mencerminkan karakter struktur pendapatan daerah ketimbang kekeliruan pada landasan teori. Data DJPK (2022) mencatat bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD provinsi se-Indolehonesia rata-rata hanya sekitar 29,34 persen, sementara dana transfer pusat menyumbang lebih dari 61 persen. Pola serupa juga tampak di Jawa Tengah, kontribusi PAD Kabupaten Cilacap pada 2019–2022 berkisar 19,81 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan pendapatan Kabupaten Klaten pada 2018 justru didominasi dana transfer pusat sebesar 66,8 persen atau setara Rp1,679 triliun dari total Rp2,512 triliun (Agung, 2019). Dengan porsi PAD yang relatif kecil dibandingkan dana transfer, perubahan PAD belum cukup besar untuk mengubah rasio efisiensi belanja-pendapatan secara agregat, sebuah pola yang juga konsisten dengan temuan Mardiani (2018) dan Kusumasari (2017) yang sama-sama tidak menemukan pengaruh signifikan PAD terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil serupa juga berlaku pada pengujian moderasi. Interaksi antara PAD dan opini audit BPK tidak signifikan, berbeda dari temuan Zahrah dan Zaen (2024), Suandani (2021), Dewata dkk. (2017), Susanti dan Amir (2016), maupun Putri (2025) yang menempatkan opini audit sebagai faktor berpengaruh. Perbedaan ini paling mungkin dijelaskan oleh sebaran data opini audit yang sangat timpang pada sampel penelitian ini dari 175 observasi, 174 di antaranya (99,43 persen) memperoleh opini WTP, sehingga variasi pada variabel moderasi nyaris tidak ada. Padahal, efek moderasi hanya dapat terdeteksi apabila terdapat variasi kondisi moderator yang cukup untuk dibandingkan. Dengan demikian, tidak terbuktinya H2 lebih tepat dibaca sebagai keterbatasan variasi data pada konteks Jawa Tengah, bukan sebagai bantahan terhadap logika teori keagenan itu sendiri sebuah pola yang juga pernah dilaporkan oleh Mardiani (2018).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa hipotesis pertama tidak terbukti, karena tidak ditemukan adanya dampak yag signifikan dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2024. Penelitian ini juga menemukan bahwa opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berperan sebagai faktor moderator dalam hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan kinerja keuangan pemda. Sehingga, hipotesis kedua juga tidak didukung secara empiris, meskipun opini audit biasanya dianggap sebagai mekanisme pengawasan yang relevan dalam teori agensi. Ukuran pemerintah daerah sebagai variabel kontrol juga tidak menunjukkan pengaruh yang berarti, dan secara simultan ketiga variabel bebas yang diuji belum terbukti memengaruhi kinerja keuangan daerah secara bersama-sama, sebagaimana tecermin dari nilai koefisien determinasi yang sangat rendah. Temuan ini mengarahkan pada dugaan bahwa efisiensi belanja terhadap pendapatan daerah di Jawa Tengah selama periode yang diteliti lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor di luar besaran PAD, kualitas opini audit, maupun skala aset daerah, misalnya perencanaan anggaran, komposisi belanja, kebijakan transfer pusat, atau praktik tata kelola internal yang tidak secara eksplisit tercakup dalam model penelitian ini.

Beberapa keterbatasan perlu dikemukakan agar hasil penelitian ini dapat dimaknai secara proporsional. Daya jelas model yang tergolong rendah, dengan Adjusted R-squared negatif, menandakan bahwa keempat variabel yang dimodelkan belum cukup untuk menerangkan variasi rasio efisiensi secara memadai. Penelitian ini juga hanya memakai satu proksi kinerja keuangan, yaitu rasio efisiensi, sementara terpilihnya *Common Effect Model* membuat model akhir tidak memperhitungkan kemungkinan adanya karakteristik unik pada masing-masing kabupaten/kota. Pengukuran opini audit yang bersifat ordinal sederhana pun belum mengakomodasi nuansa lain dari hasil pemeriksaan BPK, seperti jumlah temuan atau tindak lanjut rekomendasi, sementara periode pengamatan yang beririsan dengan pandemi COVID-19 turut membuka kemungkinan bahwa pola hubungan antarvariabel dapat berbeda pada kondisi fiskal yang lebih stabil. Keterbatasan lain melekat pada sifat data sekunder yang digunakan serta asumsi hubungan linier antarvariabel yang diterapkan dalam model.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut yang mencangkup variabel-variabel lain yang secara teoritis dan empiris memengaruhi kinerja keuangan pemda, seperti belanja investasi, dana perataan, atau tingkat otonomi fiskal, serta mempertimbangkan proksi kinerja keuangan lain di luar rasio efisiensi agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. Pengukuran opini audit BPK juga dapat diperkaya dengan memasukkan jumlah temuan pemeriksaan atau status tindak lanjut

rekomendasi, sementara cakupan periode pengamatan dapat diperpanjang atau dipisahkan antara masa pandemi dan sesudahnya untuk menguji kestabilan pola hubungan yang ditemukan. Kemungkinan hubungan non-linier atau efek ambang antara PAD dan kinerja keuangan daerah juga layak dijajaki pada penelitian mendatang, termasuk melengkapi pendekatan kuantitatif dengan telaah kualitatif untuk menangkap faktor kontekstual yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh data sekunder. Bagi pemerintah kabupaten/kota, hasil penelitian ini mengingatkan agar besaran PAD tidak dijadikan satu-satunya tumpuan dalam memperbaiki efisiensi keuangan daerah, melainkan perlu diimbangi dengan perhatian yang setara pada perencanaan dan pengendalian belanja, sembari tetap menjaga kualitas opini audit BPK sebagai cerminan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

DAFTAR REFERENSI

Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris kabupaten dan kota se-Eks Karesidenan Pekalongan periode 2016–2020). Jurnal Aplikasi Akuntansi, 7(1), 60–80. https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165

Arens, A. A., & Beasley, M. S. (2020). Auditing and assurance services: An integrated approach. Pearson.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 2024. https://jateng.bps.go.id/id

Dewata, E., Ilmiyyah, N. M., & Saftiana, S. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012–2015. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 147–162.

Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh opini audit dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(2), 104–117.

Fariyanda, F., & Umyana, F. (2025). Mengukur kemandirian fiskal daerah: Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil dalam era desentralisasi di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(5), 4743–4754.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). Dasar-dasar ekonometrika (Edisi 5, Buku 2). Salemba Empat.

Halim, A. (2018). Akuntansi keuangan daerah (Edisi 4). Salemba Empat.

Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik. (2017). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). https://peraturan.bpk.go.id/

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Lathifa, H. (2019). Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8(1), 1–10.

Maggara, T. S., Putri, B. K., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis ketergantungan pemerintah daerah dan kemandirian fiskal. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(4), 34–46.

Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Andi.

Mulyadi. (2017). Auditing (Edisi ke-6). Salemba Empat.

Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sarit, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). Penelitian bisnis: Teknik dan analisis data dengan SPSS, Stata, EViews. Yayasan Kita Menulis.

Noviyanti, N. A., & Januarti, I. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi, 5(1), 1–10.

Pratama, R. D., & Maslichah. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 11(6), 45–58.

Purgiyanti, M. D. (2023). Ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, dan opini audit terhadap kinerja keuangan daerah: Studi empiris pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali tahun 2017–2020 [Tesis tidak dipublikasikan]. Universitas terkait.

Putri, W. (2025). Analisis kinerja pemerintah daerah Jawa Tengah ditinjau dari pendapatan asli daerah dan belanja modal. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 11, 921–932.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/

Siregar, S. V., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, opini audit, dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 12(1), 1–19.

Suandani. (2021). Pengaruh opini audit, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015–2019. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(2), 728–739.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Susanti, D., & Amir, H. A. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, opini audit, dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah: Studi pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera tahun 2010–2013. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(1), 1–15.

Zahrah, F. A., & Zaen, M. R. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, opini audit, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 1–12.